

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM ALOKASI DANA DESA PADA  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi pada Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu EKonomi dan  
Bisnis Islam**



**Oleh :**

**REVI DUROTUN NAZHIROH**

**NPM : 1251010073**

**Program Studi : Ekonomi Islam**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1439 H / 2018 M**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM ALOKASI DANA DESA PADA  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi pada Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu EKonomi dan  
Bisnis Islam**

**Oleh :**

**REVI DUROTUN NAZHIROH**

**NPM : 1251010073**

**Program Studi : Ekonomi Islam**

**Pembimbing I : Madnasir, S.E., M.Si**

**Pembimbing II : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P.,M.S.I.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1439 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Alokasi Dana Desa adalah salah satu program pemerintah daerah dalam bentuk Dana perimbangan yang diserahkan pada masing-masing kabupaten/kota. Pada penelitian ini Kecamatan Sumberejo memiliki tiga belas pekan/kelurahan yang masing-masing mendapat Dana Desa dengan jumlah yang berbeda-beda. dan begitupun dengan realisasi dana tersebut. masing-masing pekan memiliki rencana yang berbeda-beda. Dengan adanya program Alokasi Dana Desa ini peneliti memiliki alasan penelitian yaitu alasan objektif karena peneliti ingin mengetahui apakah program Alokasi Dana Desa efektif dalam pemberdayaan ekonomi di kecamatan Sumberejo. Alasan subjektif, karena penulis bertempat tinggal di kecamatan sumberejo.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. bagaimana efektivitas program Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan ekonomi, dan 2. bagaimana pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari masing-masing kantor desa di kecamatan Sumberejo. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber terkait. Realisasi Alokasi Dana Desa terbagi atas empat bidang, yang termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi. terdapat dua kelompok pemberdayaan ekonomi di kec. Sumberejo yaitu kelompok produksi kelanting dan kelompok wanita tani. masing-masing kelompok mendapat realisasi dana yang berasal dari Alokasi Dana desa dari masing –masing pekan yaitu pekan wonoharjo dan pekan simpang kanan.

Dari Penelitian ini dapat disimpulkan Di kecamatan Sumberejo terdapat tiga belas desa, yang masing-masing mendapatkan Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang berbeda-beda. Dari lima desa yang diteliti hanya dua desa yang sudah melaksanakan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan Alokasi Dana Desa, dari sini dapat kita ketahui bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa belum efektif pada bidang pemberdayaan ekonomi, hal ini terjadi karena desa yang lain masih banyak diprioritaskan pada pembangunan fisik sehingga masyarakat lebih banyak menganggarkan untuk infrastruktur. Pemberdayaan ekonomi melalui Alokasi Dana Desa dengan membentuk kelompok produksi kelanting dan kelompok wanita tani sudah termasuk pada indikator program prioritas yaitu pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi. secara umum kelompok produksi kelanting dan kelompok wanita tani dapat dikatakan efektif dalam perspektif ekonomi islam dilihat dari pencapaian konsep pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam yaitu keadilan, pertanggungjawaban dan takaful.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Program Alokasi Dana Desa pada  
Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam  
**Nama** : Revi Durotun Nazhiroh  
**NPM** : 1251010073  
**Jurusan** : Ekonomi Syari'ah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Madnasir, S.E., M.Si.**

**NIP. 19750424200212100**

  
**Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I.**

**NIP. 1976052920080102010**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan, Ekonomi Syari'ah**

  
**Madnasir, S.E., M.Si.**

**NIP. 19750424200212100**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

**Sekripsi dengan judul : ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA  
PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi pada Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus). Disusun oleh :**

**Revi Durotun Nazhiroh, NPM : 12510100723, Jurusan : Ekonomi Syari'ah.**

**Telah dimunaqasyahkan pada hari/tanggal : Rabu, 19 Desember 2018.**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : A. Zuliansyah, M.M**

(.....)

**Sekretaris : Dimas Pratomo, S.E.I., M.E**

(.....)

**Penguji I : Drs. H. Nasruddin, M.Ag**

(.....)

**Penguji II : Hj. Mardiyah Hayati, S.P., M.Si.**

(.....)

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag**  
**NIP. 195808241989031003**

## MOTTO

وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَائْتَايَ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Diamemberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

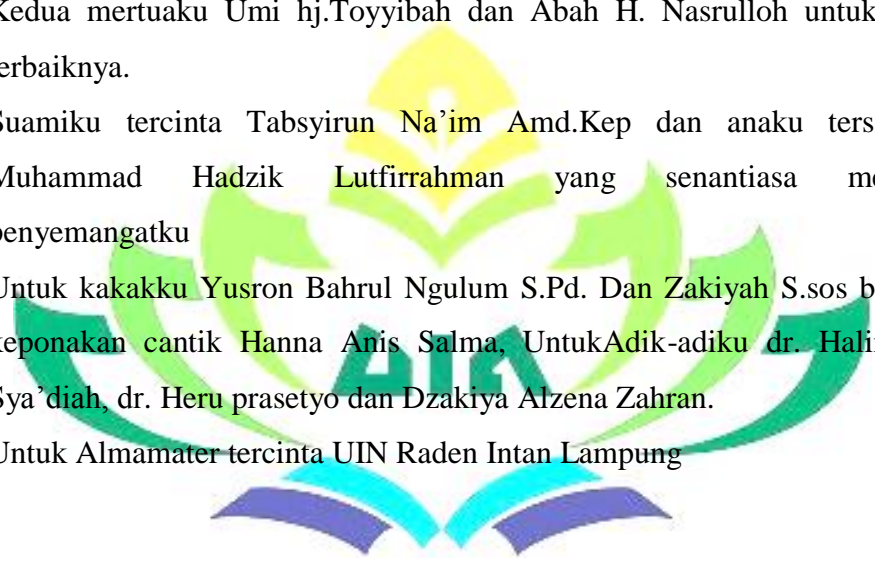




## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan :

1. Kedua orang yang tidak pernah letih dalam memperjuangkan masa depan anak-anaknya, yang selalu mendukung baik dari segi moril dan materil Bapak Sugito dan Ibu Undaya, semoga selalu dalam indungan Allah SWT. Kedua mertuaku Umi hj.Toyyibah dan Abah H. Nasrulloh untuk do'a terbaiknya.
2. Suamiku tercinta Tabsyirun Na'im Amd.Kep dan anaku tersayang Muhammad Hadzik Lutfirrahman yang senantiasa menjadi penyemangatku
3. Untuk kakakku Yusron Bahrul Ngulum S.Pd. Dan Zakiyah S.sos beserta keponakan cantik Hanna Anis Salma, Untuk Adik-adiku dr. Halimatus Sya'diah, dr. Heru prasetyo dan Dzakiya Afzena Zahran.
4. Untuk Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis di lahirkan pada tanggal 14 Agustus 1995 di Pekon Sumbermulyo, Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Sugito dan ibu Undaya.

Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 3 Sumbermulyo dari tahun 2000 sampai 2006, kemudian melanjutkan di MTs Al-Ma'ruf dari tahun 2006 dan lulus tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan di SMA N 1 Sumberejo dari tahun 2009 dan diselesaikan pada tahun 2012. Lalu pada tahun yang sama melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, yang saat ini telah beralih menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil program studi Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada saat ini penulis berprofesi sebagai perangkat desa Pekon Sumbermulyo Kec. Sumberejo sebagai Kasi Pemerintahan.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “analisis Efektivitas program Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada ;

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan dan Deki Firmansyah, S.E.,M.Si. selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Madnasir, S.E., M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Hj. Mardhiyah Hayati, S.P.,M.S.I. selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.



**Revi Durotun N.**  
**1251010073**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pembangunan Ekonomi .....	18
1. Peran pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi.....	18
2. Pemerintah dalam Ekonomi Islam .....	24
3. Pengembangan Otonomi Daerah.....	25
4. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	27
5. Otonomi Desa.....	27
6. Desa dan Pembangunan Pedesaan .....	29
7. Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	30
B. Pengelolaan Keuangan Daerah	



1. Sumber Pendapatan Daerah .....	35
2. Prinsip-prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	38
3. Kebijakan Alokasi Dana Desa .....	39
C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi .....	
1. Pengertian Pemberdayaan .....	43
2. Pemberdayaan Ekonomi .....	44
3. Pemberdayaan Ekonomi dalam Pandangan Islam .....	46
4. Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	48
D. Konsep Efektivitas .....	
1. Pengertian Efektivitas .....	49
2. Ukuran Efektivitas .....	51

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Sumberejo .....	54
2. Kondisi Geografis Kecamatan Sumberejo .....	56
3. Kondisi Demografis kecamatan Sumberejo .....	56
4. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk .....	59
B. Potensi Ekonomi Pekon di Kecamatan Sumberejo .....	
1. Pertanian .....	61
2. Perdagangan .....	62
3. Perindustrian .....	63
4. Peternakan .....	63
C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sumberejo .....	
1. Pekon Argopeni .....	64
2. Pekon Margoyoso .....	64
3. Pekon Simpangkalan .....	64
4. Pekon Wonoharjo .....	65
5. Pekon Sumbermulyo .....	65

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Pekon .....	
--	--

1. Pemerintahan Pekon.....	85
2. Pengelolaan Keuangan Pekon .....	88
3. Pendapatan Desa .....	88
<b>B. Pembangunan Pekon</b>	
1. Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon .....	89
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Pekon .....	90
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan.....	91
4. Bidang Pemberdayaan.....	91
<b>C. Efektivitas Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Ekonomi</b>	
1. Alokasi Dana Desa di Kec. Sumberejo .....	92
2. Pendapatan Alokasi Dana Desa Kec. Sumberejo.....	93
3. Efektivitas Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Ekonomi.....	94
<b>D. Efektivitas Program Alokasi Dana Desa Perspektif Ekonomi Islam</b>	
1. Indikator Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Analisis Efektivitas Program Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam”. Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini adapun beberapa kata yang harus dijelaskan yaitu :

#### 1. Analisis

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil penelitian sehingga dapat diorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit sehingga dapat disimpulkan dan difahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>1</sup>.

#### 2. Efektifitas

Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.<sup>2</sup>

#### 3. Alokasi Dana Desa

---

<sup>1</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta 2007) hlm.244

<sup>2</sup> . *UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*. (Ooleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015) hlm. 70

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

#### 4. Pemberdayaan

Adalah membuat komunitas lokal memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka.<sup>3</sup>

#### 5. Ekonomi

Ilmu yang mempelajari tentang asas-asas produksi, distribusi, serta penggunaan barang. Termasuk juga perdagangan dan pemanfaatan sumberdaya.<sup>4</sup>

#### 6. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran islam.<sup>5</sup>

Dengan penjelasan judul penelitian di atas, dapat diketahui bahwa peneliti ini dilakukan dengan menganalisis efektivitas program Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan ekonomi di beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Sumberejo dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam.

### B. Alasan memilih judul

#### 1. Alasan objektif

---

<sup>3</sup>Muchtar Masaed, Jurnal Media Inovasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Yogyakarta, 1997), hlm. 50.

<sup>4</sup> *Opo., Cit* hlm. 66

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, "*Ekonomi Islam*", (Yogyakarta: Rajawali Pers, Depok 2013,) hlm. 13

Mengingat bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana kucuran dari pemerintah yang ditujukan secara langsung untuk masyarakat melalui pemerintahan pekon, serta pengalokasian Dana Desa yang dapat realisasikan untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik, maka penulis melakukan penelitian efektivitas alokasi Dana Desa pada program non fisik (pemberdayaan ekonomi) dalam perspektif ekonomi Islam.

## 2. Alasan subjektif

Dari aspek yang peneliti bahas permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas/diteliti. Disamping penelitian yang penulis lakukan ada relevasinya dari ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.

## C. Latar belakang Masalah

Mengutip dari peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>6</sup>.

Pemahaman Desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Bersamaan

---

<sup>6</sup> Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus. *Materi Bimbingan Teknis Kepala Pekon Se-Kabupaten Tanggamus*, (Tanggamus: Pemda Tanggamus 2015).



dengan diterbitkannya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mengetahui prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan perekonomian masyarakat.

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, Pengelolaan Wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk diperjual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10%

(sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.<sup>7</sup>

Tujuan Pembangunan desa dan kawasan pedesaan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>8</sup>

Sebagaimana dalam islam ditegaskan bahwa dianjurkan kepada manusia, untuk melakukan segala aktivitas serta tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur. Al-Qur'an menekankan kepada manusia, kaum muslimin khususnya, agar selalu bekerja untuk mencari rizki didunia ini sesuai dengan Firman Alloh yaitu :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٢٠٦﴾

---

<sup>7</sup>UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. (Ooleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015) h. 62

<sup>8</sup> Ibid h. 62

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung<sup>9</sup>” (Al-Jumu’ah :10)

Secara pemerintahan islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian<sup>10</sup>.

Sebagaimana individu masyarakat juga bertanggungjawab kepada Allah terhadap orang yang lemah dan miskin yang hidup di dalam kelompoknya. Masyarakat bertanggungjawab untuk memperkuat yang lemah dan memberikan sarana yang cukup bagi yang miskin agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya<sup>11</sup>

Program Alokasi Dana Desa ini sudah berjalan beberapa tahap di Kecamatan Sumberejo yang merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Tanggamus. Kecamatan Sumberejo terdiri dari tiga belas desa yang masing-masing desa mendapatkan Alokasi Dana Desa dengan nominal yang berbeda-beda. Pengelolaan Lokasi Dana Desa

---

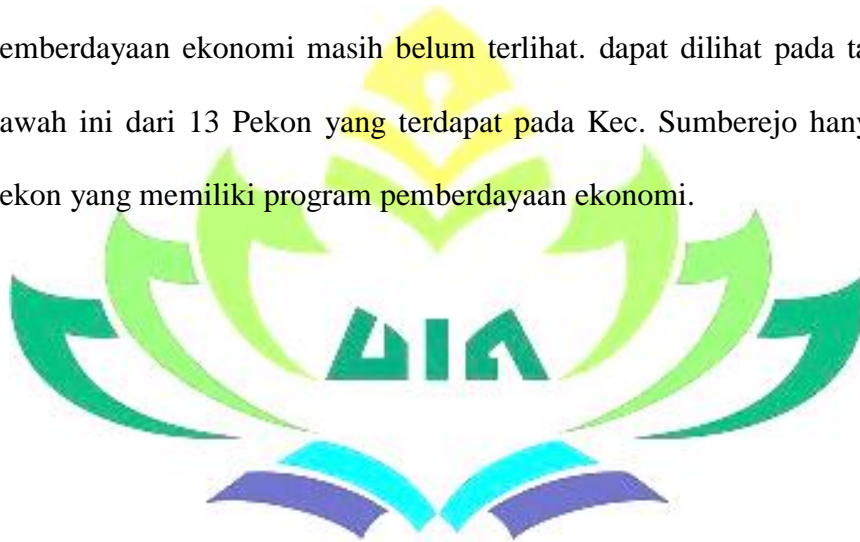
<sup>9</sup> Al-Qur’an dan Terjemah, (CV. Penerbit Diponegoro Bandung :2013)

<sup>10</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2013) hlm.117

<sup>11</sup> Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf,1995)hlm.156

sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan dipimpin oleh kepala desa bekerjasama dengan perangkat desa. Program realisasi Alokasi Dana Desa dari masing-masing desa juga berbeda sesuai dengan prioritas kebutuhan desa tersebut.

Namun implementasi program Alokasi Dana Desa masih banyak terfokus pada pembangunan infrastruktur saja. Sedangkan pada pemberdayaan ekonomi masih belum terlihat. dapat dilihat pada tabel di bawah ini dari 13 Pekon yang terdapat pada Kec. Sumberejo hanya dua pekon yang memiliki program pemberdayaan ekonomi.



**TABEL 1.1**  
**Data Kepemilikan Program Pemberdayaan Ekonomi**

No.	Nama Pekon	Memiliki program pemberdayaan Ekonomi	
		ya	tidak
1	Wonoharjo	Ya	
2	Simpang Kanan	Ya	
3	Dadapan		Tidak
4	Margoyoso		Tidak



5	Margodadi		Tidak
6	Sumbermulyo		Tidak
7	Tegal Binangun		Tidak
8	Sidomulyo		Tidak
9	Sidorejo		Tidak
10	Kebumen		Tidak
11	Argopeni		Tidak
12	Argomulyo		Tidak
13	Sumberejo		Tidak

Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan tujuan umum mengetahui bagaimana implementasi program Alokasi Dana Desa dalam rangka pemberdayaan Ekonomi serta ingin mengetahui efektivitas program pemberdayaan ekonomi. Ini dapat dilihat dari realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada kecamatan Sumberejo yang masih banyak terfokus pada pembangunan infrastruktur masing-masing desa.

Pembangunan infrastruktur desa memiliki tujuan untuk membangun desa secara fisik. Namun pembangunan yang sebenarnya tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik saja. Di kecamatan sumberejo banyak sekali potensi ekonomi masyarakat yang perlu dilatih dan dikembangkan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efektif. Seperti pengembangan produk industri rumah tangga baik dari segi

inovasi produk maupun strategi pemasaran. Sehingga dapat menyeimbangkan pembangunan baik secara fisik dan non fisik.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **Analisis Efektivitas Program Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus**”.

#### **D. Rumusan masalah**

1. Bagaimana efektivitas Program Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Ekonomi
2. Bagaimana Efektivitas Program Alokasi Dana Desa Perspektif Ekonomi Islam

#### **E. Tujuan dan manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Mengetahui dan menganalisa efektivitas program Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan ekonomi di Kecamatan Sumberejo
  - b. Mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

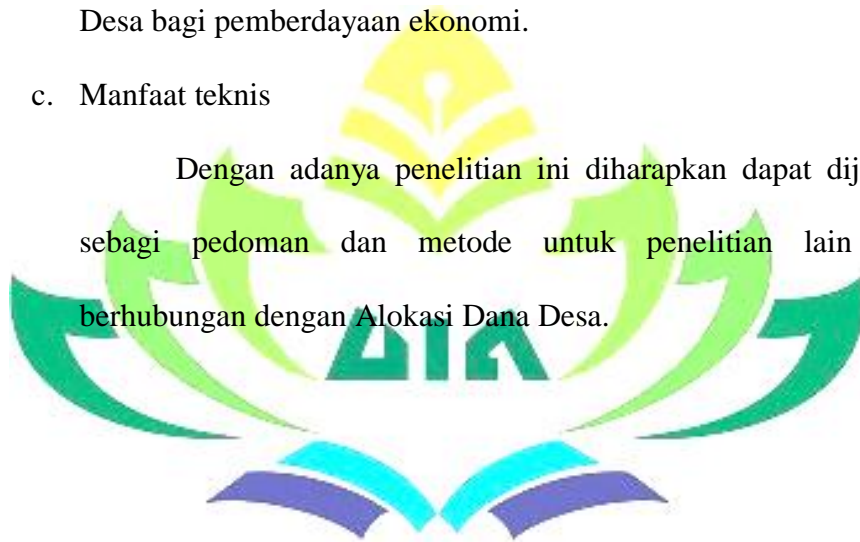
Agar mendapat tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi islam.

b. Secara praktis

Penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemahaman terhadap proses pelaksanaan dan efektivitas program Alokasi Dana Desa bagi pemberdayaan ekonomi.

c. Manfaat teknis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan metode untuk penelitian lain yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.<sup>12</sup> hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dari Kecamatan Sumberejo serta dinas terkait.

---

<sup>12</sup> Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial , (Jakarta: Mandar Maju, 1996), hlm.

Penelitian ini dilakukan dalam lokasi Kecamatan Sumberejo kabupaten Tanggamus. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang adadi lapangan mengenai hal-hal yang diteliti, yaitu dengan menganalisa efektivitas pengelolaan program Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan ekonomi perspektif ekonomi islam.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini, pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana kondisi efektivitas pengelolaan program Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan ekonomi perspektif ekonomi islam.

## 3. Sumber Data

Pada penelitian ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat menjawab persoalan yang dirumuskan oleh peneliti, metode penelitian yang digunakan yakni :

### a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: penerbit Alfabeta, 2008) hlm.205

studi yang bersangkutan dalam hal ini data diperoleh dari masing-masing aparat desa di Kecamatan Sumberejo.<sup>14</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.<sup>15</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, Undang Undang tentang desa, jurnal, skripsi, penelitian serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan tema penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penghimpunan data dilokasi peneliti penulis menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut :

##### a. Metode Wawancara

Metode wawancara (interview) adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.<sup>16</sup> Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dan bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interview tidak secara langsung mengarahkan Tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian.<sup>17</sup> Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi

---

<sup>14</sup> Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis*, (Medan: USU Pers 2010) h.2

<sup>15</sup> Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008) hlm. 71

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 83

<sup>17</sup> IGusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, ( Yogyakarta : CV Andi Offset) hlm. 64



wawancara hanya pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.<sup>18</sup> Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan Program Alokasi Dana Desa.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>19</sup> Dalam observasi penelitian menggunakan jenis observasi non partisipasi, tidak terlibat dalam kegiatan yang diobservasi. Peneliti ini hanya menggunakan data-data yang sudah ada di wilayah kecamatan Sumberejo.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan tentang masalah penelitian.<sup>20</sup>

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 65

<sup>19</sup> *Ibid*, 52

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006) hlm. 83

kesimpulannya.<sup>21</sup> Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian.<sup>22</sup> Populasi dalam penelitian ini terdiri dari :

TABEL 1.2

Jumlah Populasi Penelitian

No	Pekon	Jumlah Aparatur Pekon	Jumlah Tokoh Masyarakat
1	Wonoharjo	23	40
2	Simpang kanan	24	30
3	Dadapan	12	20
4	Simpang Rowo	13	12
5	Margoyoso	22	31
6	Margodadi	13	25
7	Sumbermulyo	24	25
8	Argopeni	21	50
9	Argomulyo	21	30
10	Sumberejo	24	25
11	Tegal Binangun	25	12
12	Kebumen	11	13
13	Sidorejo	11	11
	Jumlah	244	324

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Bagian Pemerintahan

b. Sampel

Sampel adalah sebagian wakil yang diteliti. Sempel digunakan untuk mendapatkan data yang kongkrit dan dapat dipertanggung

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 80

<sup>22</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta) 1991, hlm.130

jawabkan sebagaimana tujuan yang diharapkan penulis menggunakan teknik sampling yaitu : “cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representif atau benar-benar populasi”.<sup>23</sup> Teknik pengambilan sampel ini dengan cara sampling non random atau sample nonprobabilitas yaitu cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini diambil karena perencanaan Program Alokasi Dana Desa merupakan hasil kesepakatan antara aparat desa dengan tokoh masyarakat. Di Kecamatan Sumberejo terdiri dari tigabelas kecamatan yang dijadikan populasi tapi karena keterbatasan penulis dalam mengelola data maka penulis tidak menggunakan data secara keseluruhan untuk di olah. Tetapi untuk objektivitas data maka penulis menggunakan perwakilan sampel setiap desa di kecamatan sumberejo. Oleh karena itu sampel diambil dengan data sebagai berikut.

TABEL 2.1

Jumlah Sampel Penelitian

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM, 1983) hlm. 180

No	Pekon	Jumlah Perangkat Pekon	Jumlah Tokoh Masyarakat
1	Argopeni	21	50
2	Margoyoso	22	31
3	Simpang kanan	24	30
4	Wonoharjo	23	40
5	Sumbermulyo	24	25

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Bagian Pemerintahan

## 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta fakta yang umum, peristiwa peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta fakta dan peristiwa peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.<sup>24</sup>

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif yaitu memberikan predikat pada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>25</sup> yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang yang diperoleh dari masyarakat di setiap kelurahan yang berkaitan dengan program Alokasi Dana Desa.

<sup>24</sup> Sutrisno hadi, *metode research jilid I*, (Jogjakarta: andi , 2002) hlm.42

<sup>25</sup> Kartini Kartono , *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Cet VII Mandar Maju, 1996),hlm.352

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembangunan Ekonomi

##### 1. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi

Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga bekas jajahan harus benar-benar aktif dan positif. Karena pemerintah harus mempunyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan tingkat taraf hidup atau kemakmuran rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang banyak dan bernilai tinggi. Karenanya penjajah melakukan penjajahan dibanyak negara terbelakang yang kaya akan sumber daya alamnya. Dalam zaman yang segalanya serba global, peranan pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi khususnya merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih makmur. Bahkan diharapkan pada waktunya bisa menjadi negara maju/industri. Masalah Negara terbelakang atau Negara berkembang begitu besarnya dan masaah itu tidak bisa diserahkan begitu saja pada mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi<sup>26</sup>.

Untuk membangkitkan negara-negara berkembang atau terbelakang dari stagnasi dibutuhkan adanya pembaharuan di dalam

---

<sup>26</sup>Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) h.



rasio ekonomi secara cepat. Pada awal pembangunan, investasi harus dilakukan di bidang-bidang yang dapat meningkatkan ekonomi eksternal yakni yang mengarah pada penciptaan *overhead social* dan ekonomi, seperti tenaga kerja, angkutan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan psikologis, ideologis, sosial, dan politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi menjadi tugas terpenting pemerintah. Karenanya ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan menyeluruh. Menurut Arthur Lewis lingkup itu mencakup penyelenggaraan pelayanan umum, penentuan sikap, pembentukan lembaga-lembaga ekonomi, penentuan penggunaan sumber daya, penentuan distribusi pendapatan, pengendalian jumlah uang, pengendalian fluktuasi, penjaminan pekerjaan penuh, dan penentuan laju investasi<sup>27</sup>.

a. Pemerintahan yang baik (good Governance) dan Pemerintah yang Amanah

Kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaannya ditandai dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang baik, bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan mekanisme pasar yang efisien, menghindari salah alokasi, mencegah praktik-praktik KKN, baik secara politik maupun administratif.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.75

United National Development Program (UNDP) memberikan beberapa ciri yang menandai pelaksanaan good governance<sup>28</sup>, sebagai berikut :

- 1) Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif
- 2) Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu
- 3) Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan
- 4) Responsiveness, lembaga-lembaga daerah harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder
- 5) Consensus orientation, berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas
- 6) Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan
- 7) Efficiency and Effectiveness, pengelolaan sumberdaya daerah dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (Efektif)

---

<sup>28</sup> Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* (Bandung : FokusMedia, 2010) h. 03

- 8) Accountability, pertanggungjawaban kepada daerah setiap aktivitas yang dilakukan
- 9) Strategic Vision, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Sedangkan pemerintah yang amanah menurut Al-Farabi ditandai dengan kecakapan seorang pemimpin<sup>29</sup> dalam:

- 1) Kecakapan merespon kebutuhan/aspirasi masyarakat
- 2) Bertuturkata yang baik dan menyejukkan
- 3) Memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan masalah
- 4) Jujur (satunya kata dan perbuatan)
- 5) Mencintai dan berpegang kepada kebenaran
- 6) Bertindak adil dan memulikan masyarakat
- 7) Teguh dan konsisten terhadap cita-cita (visioner)
- 8) Tidak berbuat dzalim kepada rakyatnya
- 9) Berorientasi terhadap pemecahan masalah

Dari uraian di atas kiranya dapat dipahami bahwa terdapat adanya kesamaan antara konsep good governance dengan pemerintah yang amanah, sementara itu perbedaan antara keduanya terletak pada penekannya dimana good governance menekankan tentang bagaimana sehausnya pemerintah dijalankan, sedangkan pemerintah yang amanah lebih menekankan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin

---

<sup>29</sup> *Ibid*,

dalam menjalankan roda pemerintahan yang diamanahkan oleh rakyat kepadanya<sup>30</sup>

#### 1) Pengembangan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan proses desentralisasi pada saat ini. Dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa, pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antardaerah semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasilnya semakin merata diseluruh Indonesia. Selanjutnya ditegaskan pula, bahwa pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi, dan seimbang, serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Ada beberapa *Kata kunci* mengenai pembangunan daerah yang terkandung dalam GBHN yang perlu dikaji<sup>31</sup> yaitu:

- a) Pembangunan daerah disesuaikan dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah. Kesadaran pemerintah untuk melakukan desentralisasi pembangunan, terutama berkaitan dengan beberapa sektor pembangunan yang dipandang sudah mampu dilaksanakan di daerah masing-masing.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>31</sup> Priyono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2002) h.45-46

b) Adanya keseimbangan pembangunan antar daerah  
adannya kenyataan bahwa masing-masing daerah  
memiliki potensi baik alam, sumber daya manusia,  
maupun kondisi geografis yang berbeda-beda, yang  
menyebabkan ada daerah yang memiliki potensi  
untuk berkembang secara cepat dan sebaliknya, ada  
daerah yang kurang dapat berkembang karena  
berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Adanya  
perbedaan potensi daerah ini menyebabkan peran  
pemerintah pusat sebagai *'pengatur kebijakan  
pembangunan nasional'* tetap diperlukan agar  
timbul keselarasan, keseimbangan, dan keserasian  
perkembangan semua daerah, baik yang memiliki  
potensi yang berlebihan maupun yang kurang  
memiliki potensi.

Kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian dari  
kebijaksanaan pembangunan sektoral, pembangunan yang berasal  
dari pendapatan asli daerah maupun investasi swasta. Kebijakan  
pembangunan daerah yang ditempuh oleh pemerintah paling tidak  
meliputi 5 aspek<sup>32</sup> yaitu : a) Pembangunan daerah dan desa,  
b) Prasarana fisik daerah, c) Perluasan kesempatan kerja di daerah,  
d) Tata ruang dan penataan pertanahan dan e) Peningkatan  
kemampuan daerah.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.47



## 2. Pemerintah dalam Ekonomi islam

Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi islam bukan semata karena adanya kegagalan pasar dan ketidak sempurnaan pasar. Pada dasarnya, peranan pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhilafahan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*) untuk merealisasikan *falah*. Pemerintah adalah pemegang Amanah Alloh dan rasul-Nya serta amanah masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) bagi seluruh umat. Secara umum peranan pemerintah akan berkait dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan.<sup>33</sup>

Disamping tugas yang berkaitan dengan pasar pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas sehubungan dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan tanggung jawab ini pada dasarnya mencakup berbagai tugas luas yang bersifat kontekstual, sepanjang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kolektif dalam menerapkan ajaran islam. Akan tetapi beberapa tugas pokok pemerintah antara lain : (1) manajemen terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat; (2) pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan ; (3) menyusun perencanaan pembangunan ekonomi; dan (4) mengambil

---

<sup>33</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (jakarta: rajawali pers 2013) h.84

berbagai kebijakan ekonomi dan non ekonomiyang relevan bagi perwujudan falah masyarakatnya.<sup>34</sup>

Dalam ajaran islam pemenuhan kebutuhan dasar serta pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan bukan hanya tugas individual masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif seluruh masyarakat. Setiap individu harus berusaha memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan ini, sebab negara dibentuk memang untuk mengemban berbagai tugas kolektif. Negara memiliki prangkat dan sumberdaya termasuk keuangan untuk memberikan jaminan ini. Desain pembangunan ekonomi secara keseluruhan tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, sebab pasar memiliki kegagalan dan tidak kesempurnaan. Negara betugas untuk membuat perencanaan sekaigus mengawasi jalannya pembangunan ekonomi. Untuk mengelola perekonomian, pemerintah dalam sistem ekonomi islam akan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal dengan pendekatan multidisiplin.<sup>35</sup>

### 3. Pengembangan Otonomi Daerah

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan landasan yuridis bagi pengembangan *otonomi* daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota

---

<sup>34</sup> *Ibid.* h.85

<sup>35</sup> *Ibid.*,

diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.<sup>36</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespons tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power, distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas<sup>37</sup>.

Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan terhadap bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut<sup>38</sup>, yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>36</sup> Chabib, Heru, *Op.Cit.* h.34

<sup>37</sup> Chabib, Heru, *Op.Cit.* h.34

<sup>38</sup> *Ibid*, h.31

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi dalam pembangunan)

#### 4. Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengolah sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut<sup>39</sup>.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhususan daerah yang bersangkutan (*Endogenous Development*), dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan keputusan, inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi<sup>40</sup>.

#### 5. Otonomi Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

---

<sup>39</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)h. 20

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.21

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>41</sup>.

Kesatuan masyarakat hukum tersebut mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom). Dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu dimiliki sejak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa 'Desa' disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan 'daerah otonom' lainnya seperti daerah Kabupaten atau Daerah provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah pusat atau pemerintah nasional<sup>42</sup>.

Perkembangan Desa di Indonesia selanjutnya adalah pada saat diterbitkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian agar urusan yang diserahkan kepada desa dapat dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan<sup>43</sup> Desa yaitu :

- 1)Kepastian Hukum, 2)Tertib penyelenggaraan pemerintahan,
- 3)Tertib kepentingan umum, 4)Keterbukaan, 5)Proporsionalitas,
- 6)Akuntabilitas, 7)Efektivitas dan efisiensi, 8)Kearifan lokal,
- 9)Keberagaman dan 10)Partisipatif.

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 (Pedoman Teknis Peraturan Desa)

<sup>42</sup> Didiek Setia Budi Hargono, "*Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Empat Desa di Kabupaten Karang Asem Provinsi Bali*". (Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta, 2010). h.18.

<sup>43</sup> Sosialisai Peraturan Prundang Undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tanggamus ; Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, 2015) hlm.



## 6. Desa dan Pembangunan Pedesaan

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menggunakan dua pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam pembangunan desa<sup>44</sup>.

Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai besar penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa<sup>45</sup>

Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pembangunan desa. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan perdesaan dibahas bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/Kota, dan Pemerintah desa<sup>46</sup>.

## **7. Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Kegiatan ekonomi islam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kegiatan ekonomi islam sebagai madzab ekonomi tersendiri memiliki pengertian yang berbeda dengan madzab ekonomi sebelumnya. Berikut beberapa pengertian mengenai ekonomi islam :<sup>47</sup>

- a. Islam didalamnya terjelma cara islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh madzab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h.63

<sup>47</sup> Dody Rudianto, *pembangunan Ekonomi dan perkembangan Bisnis di Indonesia* (Jakarta Golden Terayon 1985) h. 5 dalam Agung Eko Purwana, *Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Justitia Islamica, vol. 10/No. 1Jan-juni 2013) h.14

dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun berhubungan dengan sejarah umat manusia.

- b. Ekonomi islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.
- c. Ekonomi islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi islam.

Pengertian di atas memberikan perbedaan yang besar dengan madzab ekonomi sebelumnya. Adapun yang menjadi ciri-ciri dan nilai-nilai dasarnya adalah : <sup>48</sup>

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem islam secara keseluruhannya. Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual, dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya. Termasuk di dalamnya adalah kehidupan berekonomi. Ketinggian tata nilai islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, perundang-undangan, tatakrama, dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h.15

pisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.<sup>49</sup>

1) Kegiatan ekonomi islam bersifat pengabdian pekerjaan apapun yang dilakukan oleh muslim, baik itu pekerjaan ekonomi ataupun bukan bisa berubah dari pekerjaan meterial biasa menjadi ibadah yang berpahala apabila orang muslim tadi dalam pekerjaannya bermaksud mencari keridhoan Alloh SWT.

2) Kegiatan ekonomi dalam islam bersifat luhur. Kedua madzab ekonomi menjadikan materialisme sebagai orientasinya. Sehingga mereka saling bertengkar untuk bersaing, memonopoli pasar-pasar dan sumber-sumber bahan baku. Persaingan ini memunculkan perang dunia baik yag pertama maupun bahkan memicu untuk terjadinya perang dunia ketiga atau perang nuklir antara blok kapitalisme dan sosialisme. Madzab ekonomi islam dalam setiap aspek kegiatan ekonominya selalu mengedepankan kerjasaa dan bagi hasil sehingga yang terjadi adalah sifat luhur saing tolong-menolong.

---

<sup>49</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, terj. Achmad Rais (Jakarta: Gema Insani Press, 1991) h. 15 dalam Agung Eko Purnama, *Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi islam*, Justitia Islamica, Vol. 10/No.1/jan-juni 2013.

3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. penyelewengan kegiatan ekonomi oleh pelaku ekonomi dikarenakan lemahnya pengawasan yang hanya mengandalkan kontrol negara. Dalam lingkungan ekonomi islam ditanamkan pengawasan Alloh SWT meskipun ia bisa lepas dari pengawasan kekuasaan manusia. pengawasan dalam bentuk seperti inilah yang menjamin keselamatan tingkah laku masyarakat dan menghilangkan penyelewengan-penyelewengan kegiatan ekonomi.<sup>50</sup>

b. Ekonomi islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi islam adalah melaksanakan misi sebagai khilafah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajiban ini dihadapan Alloh SWT. Keuntungan material yang dicapai dalam kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untk meraih cita-cita insani berupa kepatuan kepada Alloh SWT. Dengan kata lain cita-cita ekonomi islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli,

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,

atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia. Cita-cita ekonomi islam merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi perintah Alloh SWT.

Nilai-nilai dasar ekonomi islam sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi dan spritual, unsur keduniaan dan keakhiratan, dan unsur individu dan masyarakat. Keseimbangan unsur-unsur ini akan berdampak pada keberhasilan dan kesuksesan seseorang dan masyarakat dalam mencapai cita-citanya.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (*transedental*). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk untuk didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, Sabda rasul, Qiyas, maupun ijtihad para ulama fakih.

Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar



membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (*Mental attitudes*). Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa serta umat manusia.

## **B. Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **1. Sumber Pendapatan Daerah**

#### **a. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana perimbangan terbagi atas bagi hasil pajak dan bagi hasil non pajak<sup>51</sup>.

#### **b. Bagi hasil pajak**

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, atau dalam arti yang sempit sering disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan

---

<sup>51</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.167

antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini timbul karena adanya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah oleh badan-badan yang disusun secara bertingkat. Pendekatan terhadap hubungan ini dapat terjadi interdisiplin misalnya ketatanegaraan, administrasi negara, politik, hukum, ekonomi dan lainnya. Karena masalah perimbangan keuangan ini menjadi tuntutan reformasi maka pemerintah telah menetapkan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada tiga fungsi yang di emban oleh pemerintah yakni fungsi alokasi, meliputi antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, serta pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi, meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. Fungsi stabilitas, pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter. Ketiga fungsi ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian ketiganya menjadi landasan penting dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah<sup>52</sup>.

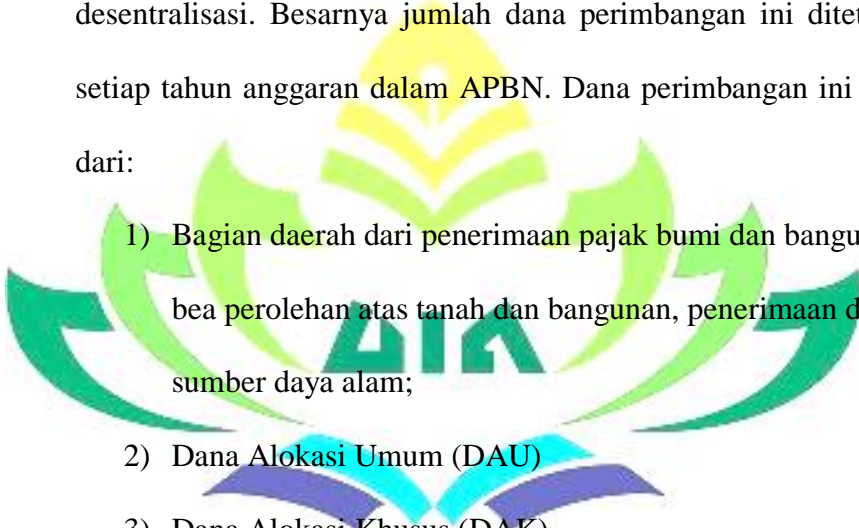
Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Selanjutnya akan dibicarakan mengenai dana perimbangan khusus tentang pajak. Dimana dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah khususnya dari pajak bumi dan

---

<sup>52</sup> *Ibid.* h.157

bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam. Pada dasarnya semua pajak tersebut memperhatikan potensi daerah penghasil<sup>53</sup>.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan ini terdiri dari:

- 
- 1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam;
  - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
  - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan merupakan upaya mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah yang terdiri dari segi hasil pajak dan bukan pajak. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan presentase tertentu didasarkan pada daerah penghasil<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 158

## 2. Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pada dasarnya apapun bentuk organisasi, sektor swasta ataupun publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cetak biru bagi pencapaian visi dan misinya. Untuk itu penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Untuk pemerintah daerah prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah<sup>55</sup> antara lain sebagai berikut

- a. Komprehensif dan disiplin. Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, anggaran daerah harus disusun secara komprehensif yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kepastian kelembagaan yang dipunyai, dan mencari, cara-cara terbaik untuk memecahkannya.
- b. Fleksibilitas. Pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus diterapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

---

<sup>55</sup> Sadu Wasistiono, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* (Bandung : FokusMedia, 2010) h. 41-42

c. Terprediksi. Kebijakan terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah. Sebaliknya, bila kebijakan sering berubah-ubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi umum (DAU) yang tidak jelas misalnya, maka daerah akan menghadapi ketidakpastian yang sangat besar hingga prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh Anggaran Daerah cenderung terabaikan.

d. Kejujuran. Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran.

e. Informasi. Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Karenanya, pelaporan yang teratur tentang biaya output, dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.

f. Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi masyarakat bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan.

### **3. Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Sebuah kebijakan dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah-masalah publik yang memerlukan intrvensi pemerintah. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dalam upaya

mengatasi problem-problem di area desa, baik problem pembangunan, pemerintahan, maupun sosial masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No. 32 Th. 2004 yang kemudian diperkuat dengan PP No. 72 Th. 2005 dimana memberi kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Berdasarkan PP No. 72 Th. 2005 pasal Kabupaten/kota. Berdasarkan PP No. 72 Th. 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikan merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemeritahan, dan sosial kemasyarakatan. Melalui ADD, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan secara otonom. Dengan memanfaatkan ADD, desa juga akan dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan pemberdayaan desa.<sup>56</sup>

ADD berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (PP No. 72 Th. 2005 pasal 1 ayat 1). ADD bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen ADD dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10% dari pajak dan retribusi. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa ini adalah untuk<sup>57</sup>:

---

<sup>56</sup> Helen Florensi, *Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam memberdayakan masyarakat di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, kabupaten kediri*. (Vol. 2, No. 1, Januari 2014. ISSN 2303-341 X) h. 4

<sup>57</sup> *Ibid.*,



- a. Meningkatkan penyelenggara pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa

Sementara manfaat diadakannya ADD bagi desa antara lain : Desa dapat menghemat biaya pembangunan, desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya; Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa; Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja oprasional pemerintahan desa; Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Desa tidak lagi hanya bergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa; Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan; Dengan partisipasi semua pihak, maka

kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dll dapat tercapai.<sup>58</sup>

Dengan adanya ADD, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, memperbaiki layanan publik desa dan mendorong efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kebijakan ADD disusun oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan rakyat desa sekaligus untuk memenuhi hak-hak desa. Proses penyusunan ADD di Kabupaten/Kota melalui ; (a) Perumusan gagasan atau memunculkan prakarsa/inisiatif; (b) membentuk tim penyusun kebijakan ADD; (c) menjalankan proses penyusunan dan penetapan kebijakan secara transparan dan partisipatif; (d) Mensosialisasikan dan menjalankan kebijakan ADD secara baik dan akuntabel.<sup>59</sup>

#### 4. Alokasi Dana Desa dalam perekonomian

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 tujuan dari program

Alokasi Dana Desa adalah :

- a) Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa

---

<sup>58</sup> Sahdan, dkk. 2007: h.5 dalam Helen Florensi, *Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam memberdayakan masyarakat di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, kabupaten kediri*. (Vol. 2, No. 1, Januari 2014. ISSN 2303-341 X) h. 4

<sup>59</sup> *Ibid.*,

- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- e) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat

## C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

### 1. Pengertian pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*Power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan menaruh kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah<sup>60</sup>.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi

---

<sup>60</sup> Bappenas, *Evalasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-1/KS-1*, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak Kedeputan Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, 2010, h. 11.

aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.<sup>61</sup>

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan informasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>62</sup>

## 2. Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Sumodiningrat, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat diungkapkan sebagai berikut : 1.) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat

---

<sup>61</sup> Erni Febri Harahap, *Pemberdayaan masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN: 2086-5031.

<sup>62</sup> Edi Suharto, *Memangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h.1

adalah semua warga negara. 2.) pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. 3.) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi : (a) Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (b) Penguatan kelembagaan; (c) penguasaan teknologi; dan (d) pemberdayaan sumberdaya manusia. 4.) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntukan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. 5.) kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah : (a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar price taker; (c) pelayanan pendidikan dan kesehatan ; (d) penguatan industri kecil; (e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (f) pemerataan spasial 6.) kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup : (a) peningkatan akses bantuan modal usaha; (b)

peningkatan akses pengembangan SDM; dan (c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.<sup>63</sup>

### 3. Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pandangan Islam

Secara khusus, nilai-nilai dalam Sistem Ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam. Selalu dipegang dan menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, semua masalah yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat.<sup>64</sup> Pembangunan dalam pandangan islam adalah suatu konsep untuk norma perilaku dan sistem perekonomian yang menyangkut bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi.<sup>65</sup>

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus islam adalah akuntabilitas sosial; tanpa implikasi sosial ritus islam akan dilakukan secara sia-sia.<sup>66</sup>

Bersumber dari pandangan hidup, islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu : <sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 86-87

<sup>64</sup> M. A Manannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), h.10-11 dalam Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distriusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2013) h.62

<sup>65</sup> M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2000, h.5

<sup>66</sup> Nanich Mahendrawati, Agus Ahmad Safi, *Pengembangan Masyarakat Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001

<sup>67</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit*, h. 63.



a. *Keadilan*, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. Sesuai dengan Q.S. Al-Maidah 5:8.<sup>68</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" [Al Ma'idah(8)]

b. *Pertanggungjawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khilafah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

c. *Takaful*, (Jaminan Sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya memngajarkan hubungan

---

<sup>68</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, (CV. Penerbit Diponegoro Bandung :2013)

vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.<sup>69</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.

#### **4. Pemberdayaan Ekonomi umat**

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa

---

<sup>69</sup> Munrokhim Misanam dkk., *Text Book Ekonomi Islam*, P3EI, Jakarta, 2007, h.39 dalam Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit.*, h. 63.

percaya, diri dan harga dirinya. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi : <sup>70</sup>

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi, yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

#### **D. Konsep Efektivitas**

##### **1. pengertian efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

---

<sup>70</sup> Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (sebuah upaya dan strategi)* Eksyar. Volume 01, Nomor 01., Maret 2014

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>71</sup>

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*) . Dalam hal ini yang dimaksud sumberdaya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat<sup>72</sup>.

Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

---

<sup>71</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada kelompok pinjaman bergilir di desa mantren kec. karang rejo" *Jurnal Efektivitas pemberdayaan masyarakat*, Vol. 01 no. 01 (februari 2012) h.3

<sup>72</sup> Ibid, h.4

## 2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa afektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif<sup>73</sup>.

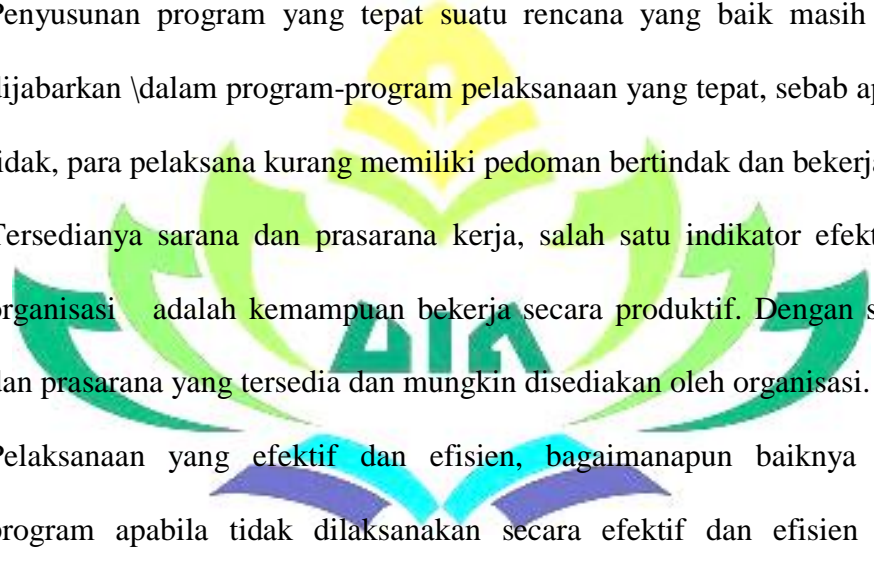
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu :<sup>74</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

---

<sup>73</sup> ibid, h. 5

<sup>74</sup> Ibid, 5,6

- 
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
  - d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
  - e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan \dalam program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para pelaksana kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
  - f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
  - g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
  - h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

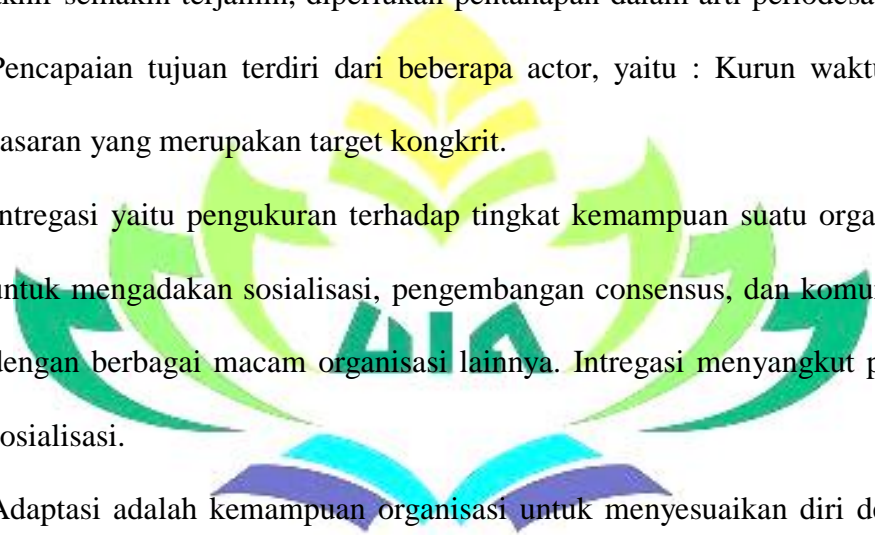
kriteria dalam pengukuran efektivitas yaitu :

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan ber laba



## 5) Pencarian Sumberdaya

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut : <sup>75</sup>

- 
- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa actor, yaitu : Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
  - b) Intregasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Intregasi menyangkut proses sosialisasi.
  - c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkupnya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definnisi-definisi pengukur tingkat efektifitas yang telah dikemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu : Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. dengan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan Ekonomi.

---



## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Sumberejo**

Diawal terbentuknya, Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan dan 6 (enam) Wilayah Perwakilan Kecamatan. Pada tanggal 19 Juni 2000 disyahkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya Kecamatan bertambah 6 (enam) Kecamatan sehingga menjadi 17 Kecamatan.

Pada tahun 2005 dilaksanakan pemekaran beberapa Kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Dan pada tanggal 23 Juni 2005 disahkan Peraturan Daerah No.05 Tahun 2005. Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya Kecamatan di Kabupaten Tanggamus bertambah 7 (tujuh) Kecamatan sehingga berjumlah 24 Kecamatan.

Seiring dengan peningkatan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 21 Desember 2006 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006, tentang pembentukan 4 (empat) Kecamatan hasil pemekaran. Dan sampai dengan Tahun 2009 banyaknya Kecamatan di Kabupaten Tanggamus sejumlah 28 Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang No 48 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus dimekarkan menjadi dua daerah Administratif yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu. Wilayah yang masuk ke dalam daerah administratif Kabupaten Pringsewu ada 8 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Gading Rejo, Ambarawa, Pardasuka, Pagelaran, Banyumas, Adiluwih, dan Sukoharjo, yang terdiri dari 101 wilayah Pekon.

Pada Akhir tahun 2011, keluar Perda No 18 tahun 2011 yang tertanggal 1 Oktober 2011 yang mengatur tentang pemekaran wilayah pekon di Kabupaten Tanggamus yang tadinya 278 Pekon menjadi 301 Pekon dengan bertambah sebanyak 23 Pekon. Pada tanggal 19 Desember 2011 disahkanlah perda No 19 Tahun 2011 yang mengatur pemekaran Pekon Tanjung Sari dari pekon Banjarmasin, sehingga jumlah Pekon di Kabupaten Tanggamus menjadi 302/Pekon dengan 20 Kecamatan.

Kecamatan Sumberejo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Talang Padang, untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat dan dipandang Kecamatan Talang Padang sangatlah luas maka para Tokoh Masyarakat, Toko Agama, serta Kepala Desa dikumpulkan dan diberi tawaran untuk mengadakan pemekaran Kecamatan yang sifatnya perwakilan.

## 2. Kondisi Geografis Kecamatan Sumberejo

Kecamatan Sumberejo merupakan bagian dari Kabupaten Tanggamus yang secara resmi menjadi Kecamatan definitip pada tanggal 06 September 2000, secara geografis Kecamatan Sumberejo berbatasan :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pangung
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Gisting
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pangung

## 3. Kondisi Demografis kecamatan Sumberejo

### a. Keadaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Sumberejo sebagian adalah suku jawa, namun ada juga sebagian suku Lampung dan sebagian kecil suku Padang, Batak, Sumendo dan lain-lain.

Penduduk Kecamatan Sumberejo yang tersebar di 13 (*tiga belas*) Pekon tersebut berjumlah 32.665 jiwa yang terdiri dari laki-laki 16.225 jiwa, Perempuan 16.339 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 8.287 KK.

Jumlah Pekon di Kecamatan Sumberejo ada 13 (*tiga belas*) Pekon diantaranya :

Tabel 1 :

Jumlah Pekon di Kecamatan Sumberejo

NO	KEL/PEKON	KAKON/LURAH	SEKDES
1	WONOHARJO	SATRI HARSO	MISYANTO
2	SIMPANG KANAN	ANASKURI,S.Kom (PJ)	ANASKURI, S.Kom
3	DADAPAN	SUKIMIN (PJ)	SUKIMIN
4	MARGOYOSO	MUNAJI (PJ)	PRANOTO
5	MARGODADI	SAFROL LATIF, S.Kom (PJ)	SAPROL LATIF, S.Kom
6	ARGOPENI	KUSNUN,S.Kom (PJ)	KUSNUN, S.Kom (PJ)
7	ARGOMULYO	SUGIONO	BUDOYO, S.Pd
8	SUMBEREJO	SUCIPTO (PJ)	SUCIPTO
9	TEGAL BINANGUN	SUNARDI, SP	PURWANTO, S.Kom
10	SUMBERMULYO	SUGITO	SUDIRO
11	SIDOMULYO	RIYADI MARTANA (PJ)	SRI WINARKO
12	KEBUMEN	ABDUL EFENDI	MADSUKRI
13	SIDOREJO	ALI YUNUS	ROHMADI
	JUMLAH	13	

*Sumber: KASI pemerintahan Kecamatan Sumberejo*

b. Wilayah Administratif

Kecamatan Sumberejo memiliki luas wilayah sekitar 10.032 Ha atau 10,32 Km<sup>2</sup>, dengan 13 Pekon yang masing-masing luas dan jarak tempuh Pekon ke Ibukota Kecamatan sebagai berikut .



Tabel 2. Luas Wilayah menurut Pekon/Kel. dalam Kecamatan Sumberejo

NO	KEL/PEKON	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	WONOHARJO	199 Ha/ M <sup>2</sup>
2	SIMPANG KANAN	472,25 Ha/ M <sup>2</sup>
3	DADAPAN	1.176 Ha/ M <sup>2</sup>
4	MARGOYOSO	501 Ha/ M <sup>2</sup>
5	MARGODADI	257 Ha/ M <sup>2</sup>
6	ARGOPENI	206,05 Ha/ M <sup>2</sup>
7	ARGOMULYO	201,1 Ha/ M <sup>2</sup>
8	SUMBEREJO	171 Ha/ M <sup>2</sup>
9	TEGAL BINANGUN	193,8 Ha/ M <sup>2</sup>
10	SUMBERMULYO	229,5 Ha/ M <sup>2</sup>
11	SIDOMULYO	416 ,7Ha/ M <sup>2</sup>
12	KEBUMEN	220,02 Ha/ M <sup>2</sup>
13	SIDOREJO	219,9 Ha/ M <sup>2</sup>
<b>JUMLAH</b>		

*Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Sumberejo*

Tabel 3. Jarak Pekon/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Sumberejo

NO	KEL/PEKON	JARAK (Km)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	WONOHARJO	4,6 Km
2	SIMPANG KANAN	3 Km
3	DADAPAN	2 Km
4	MARGOYOSO	0,5 Km
5	MARGODADI	1 Km
6	ARGOPENI	3 Km
7	ARGOMULYO	5 Km
8	SUMBEREJO	4,5 Km
9	TEGAL BINANGUN	5 Km
10	SUMBERMULYO	6,2 Km
11	SIDOMULYO	7 Km

12	KEBUMEN	10 Km
13	SIDOREJO	15 Km

#### 4. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Sumberejo per Desember 2013 berjumlah 32.665 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 16.225 jiwa, Perempuan 16.239 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 8.287 KK. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Jumlah Penduduk

NO	PEKON/KEL	BANYAKNYA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	WONOHARJO	537	873	890	1.763
2	SIMPANG KANAN	738	1.245	1.356	2.601
3	DADAPAN	1.081	2.897	2.728	5.625
4	MARGOYOSO	1.079	2.180	1.962	4.142
5	MARGODADI	617	1.048	1.389	2.437
6	ARGOPENI	648	1.235	1.192	2.427
7	ARGOMULYO	479	905	860	1.766
8	SUMBEREJO	568	1.065	1.036	2.301
9	TEGAL BINANGUN	415	759	727	1.486
10	SUMBERMULYO	482	687	807	1.494
11	SIDOMULYO	609	1.344	1.302	2.646
12	KEBUMEN	478	954	847	1.801
13	SIDOREJO	556	1.033	1.143	2.176
<b>JUMLAH</b>		<b>8.287</b>	<b>16.225</b>	<b>16.239</b>	<b>32.665</b>

*Sumber : Kantor Camat Kecamatan Sumberejo*

Dari Tabel di atas terlihat bahwa jumlah Penduduk di Kecamatan Sumberejo, yang paling banyak penduduknya adalah Pekon Dadapan dengan jumlah penduduk 5.628 jiwa dengan

jumlah laki-laki sebanyak 2.897 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2.728 jiwa. Sedangkan Pekon yang paling sedikit penduduknya adalah Pekon Tegal Binangun dengan jumlah penduduk 1.486 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 759 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 727 jiwa.

Dari jumlah Penduduk di atas dapat kita peroleh jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Sumberejo tahun 2013. Kepadatan masing-masing Pekon dalam Kecamatan Sumberejo sebagai berikut:

Tabel 5. Kepadatan Penduduk menurut Pekon/Kel  
Pada Kec. Sumberejo

NO	KEL/PEKON	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	KEPADATAN PENDUDUK PER KM <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
1	WONOHARJO	1.763	199 Ha/ M <sup>2</sup>	73,36
2	SIMPANG KANAN	2.601	472,25 Ha/ M <sup>2</sup>	82,22
3	DADAPAN	5.625	1.176 Ha/ M <sup>2</sup>	111,08
4	MARGOYOS O	4.142	501 Ha/ M <sup>2</sup>	201,41
5	MARGODADI	2.437	257 Ha/ M <sup>2</sup>	86,13
6	ARGOPENI	2.427	206 Ha/ M <sup>2</sup>	79,82
7	ARGOMULY O	1.766	200 Ha/ M <sup>2</sup>	81,64
8	SUMBEREJO	2.301	171 Ha/ M <sup>2</sup>	77,04
9	TEGAL BINANGUN	1.486	193,8 Ha/ M <sup>2</sup>	84,17
10	SUMBERMUL YO	1.494	229,5 Ha/ M <sup>2</sup>	62,45
11	SIDOMULYO	2.646	416 Ha/ M <sup>2</sup>	96,52
12	KEBUMEN	1.801	220 Ha/ M <sup>2</sup>	106,49
13	SIDOREJO	2.176	219,9 Ha/ M <sup>2</sup>	114,12

*Sumber : Kantor Camat Kecamatan Sumberejo*

## **B. Potensi Ekonomi Pekon di Kecamatan Sumberejo**

Untuk mata pencaharian mayoritas penduduk Kecamatan Sumberejo adalah bertani ladang dan tegalan di samping sebagai penghasil pertanian, sayur-sayuran juga sebagai penghasil kopi, lada, coklat, pala dan bunga-bunga.

Sedangkan sebagian lainnya tersebar pada mata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Wiraswasta dan Peternak Kambing , Sapi serta buruh usaha lainnya.

### **1. Pertanian**

Kopi adalah salah satu contoh pertanian yang ada di Kecamatan Sumberejo, petani di wilayah ini memulai penyemaian benih pada musim kemarau selanjutnya penanaman pada musim penghujan datang, Lahan yang digunakan oleh petani adalah daerah yang Pegunungan ataupun lereng-lereng karena lahan ini sangat cocok digunakan untuk menanam tumbuhan Kopi kelembaban udara ini atau sama halnya dengan petani kopi lain yang ada di Indonesia. Biasanya rata-rata petani panen pada bulan Agustus jika keadaan musim normal, dan biasanya petani mengolah hasil panennya sendiri dikarenakan petani ini

perorangan bukan kelompok (kelompok tani) tetapi ada juga sebagian yang berkelompok seperti Kelompok Tani.

Disamping itu petani di Kecamatan Sumberejo juga mempunyai kendala yang sangat perlu perhatian oleh Pemerintah atau Investor, karena masih banyak lahan tidur yang masih belum dimanfaatkan oleh petani disebabkan kurangnya modal dalam mengelolah lahan yang ada, lahan yang subur ini sangat besar dampaknya bila dikelolah dengan baik dikarenakan dapat membantu perekonomian masyarakat. Masyarakat khususnya para petani sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah baik itu dalam bentuk dana maupun pengetahuan dalam hal ini wawasan dalam pengolahan lahan pertanian sehingga mencapai hasil yang lebih baik.

## 2. Perdagangan

Perdagangan atau juga sering disebut jual beli adalah suatu proses transaksi yang telah disetujui oleh semua pihak dengan suatu ketentuan. Perdagangan di Kecamatan Sumberejo berkembang cukup pesat dimana terdapat pasar yang berada di pusat Kecamatan, dengan ini pusat transaksi terjadi dengan seketika dipasar tersebut. Pasar Kecamatan Sumberejo telah berdiri sejak kecamatan ini masih berada dalam wilayah Kecamatan Sumberejo otomatis pasar ini sudah berkembang dengan seiringnya perubahan Kecamatan Sumberejo. Terlihat

jelas di pasar ini adanya proses jual beli yang dilakukan setiap hari.

Pasar Sumberejo sangat bermanfaat diantaranya mekarnya suatu daerah dengan adanya suatu aktivitas perekonomian, mekarnya daerah tersebut dapat dilihat dengan banyaknya pertokoan, kios-kios, rumah makan.

### 3. Perindustrian

Industri rumah tangga pada kecamatan sumberejo berkembang dengan baik, ini dapat dilihat dari beberapa produk yang sudah dihasilkan dan telah dipasarkan terutama paa masyarakat kecamatan sumberejo. Produk yang dihasilkan bermacam-macam seperti pengolahan krupuk tempe, pengolahan kripik singkong dan pisang, pengolahan makanan berbahan dasar jambu biji, dan pengolahan gula kelapa.

Beberapa industri rumah tangga yang telah disebutkan dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran masyarakat kecamatan sumberejo serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

### 4. Peternakan

Potensi peternakan pada kecamatan sumberejo dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai peternak terutama kambing dan sapi ini dikarenakan lokasi kecamatan



sumberejo yang berada di daerah subur sehingga ketersediaan rumput pakan ternak memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Profesi sebagai ternak sapi dan kambing selain dapat memenuhi kebutuhan daging baik lokal maupun luar lingkungan kecamatan sumberejo juga dapat memberikan peluang pekerjaan pada masyarakat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

### **C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sumberejo**

#### **1. Pekon Argopeni**

Jumlah pendapatan pekon Argopeni yaitu Rp.682.353.982 dan direalisasikan untuk Bidang penyelenggaraan Pemerintah Pekon Rp.Rp.204.706.194, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon Rp.432.854.400, Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp.29.791.387, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.15.002.000<sup>76</sup>

#### **2. Pekon Margoyoso**

Jumlah Pendapatan Pekon Margoyoso yaitu Rp.694.560.040 dan direalisasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Rp.205.980.932, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon Rp.395.296.820, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

---

<sup>76</sup> Pemerintahan Pekon Argopeni. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pekon..2016.*

Rp.70.815.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Rp.22.467.288<sup>77</sup>.

### 3. Pekon Simpang Kanan

Jumlah pendapatan pekon Simpang Kanan yaitu Rp.684.737.661 dan direalisasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Rp.205.421.298, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon Rp.428.753.600. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.25.775.177, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.24.787.585.<sup>78</sup>

### 4. Pekon Wonoharjo

Jumlah pendapatan pekon Wonoharjo yaitu Rp.663.789.868 dan direalisasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.199.136.960, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.410.047.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.4.604.755, Bidang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rp.4.500.000.<sup>79</sup>

### 5. Pekon Sumbermulyo

---

<sup>77</sup> Pemerintahan Pekon Margoyoso. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pekon.* 2016.

<sup>78</sup> Pemerintahan Pekon Simpang Kanan. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pekon.* 2016.

<sup>79</sup> Pemerintahan Pekon Wonoharjo. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pekon.* 2016.

Jumlah Pendapatan Pekon Sumbermulyo yaitu Rp.671.487.740 dan direalisasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Rp.206.191.389, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon Rp.413.419.200, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.35.961.151, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.15.916.000<sup>80</sup>

#### **D. Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Ekonomi**

Realisasi Alokasi dana desa pada pemberdayaan ekonomi, dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang dan dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Terdapat dua kelompok pemberdayaan ekonomi pada Kec. Sumberejo yang terdapat pada pekon simpang kanan dan pekon wonoharjo.

##### **1. Pekon Wonoharjo**

pekon wonoharjo adalah salah satu dari tigabelas pekon yang memiliki pemberdayaan ekonomi dalam bidang pengolahan ubi kayu dengan produk yang dihasilkan yaitu makanan ringan “kelanting”. usaha ini berdiri sejak tahun 2014 dengan beranggotakan Lima orang yang keseluruhannya adalah perempuan.

---

<sup>80</sup> Pemerintahan Pekon Sumbermulyo. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pekon.* 2016.

produksi kelanting, berawal hasil panen ubi kayu (singkong) oleh warga setempat yang memiliki nilai jual rendah, oleh karena itu ibu-ibu tersebut berinisiatif untuk melakukan peningkatan harga jual dengan mengolah ubi kayu singkong menjadi produk “kelanting”. dengan adanya kelanthing dapat menggugah bahwa singkong merupakan komoditas pertanian yang layak untuk dibudidayakan. dengan adanya lanthing maka harga singkong dapat terdongkrak naik.

Usaha yang awalnya hanya memanfaatkan keahlian pengolahan dengan alat seadanya, menjadi berkembang dengan bantuan mesin giling singkong yang diberikan dari Alokasi Dana desa pekon setempat .

## 2. Pekon Simpang Kanan

Pekon simpang kanan merealisasikan Alokasi Dana Desa dalam bidang pemberdayaan ekonomi dengan mendirikan kelompok wanita tani dengan memberikan pelatihan pada anggota kelompok untuk dapat mengolah lahan pekarangan menjadi lahan yang produktif . memanfaatkan sampah rumah tangga sebagai kompos dan pembenihan bibit untuk tanaman sayuran dan buah buahan. meningkatkan potensi lahan untuk menghasilkan produk sayuran yang berkualitas dan memiliki daya jual.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Pekon

##### 1. Pemerintahan Pekon

Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>81</sup>. Desa Wonoharjo, Simpangan, Margoyoso, Argopeni, dan Sumbermulyo merupakan lima desa yang terdapat di kecamatan Sumberejo yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa<sup>82</sup>, pada Kecamatan Sumberejo Pemerintah desa disebut Kepala Pekon , Kepala Pekon adalah pejabat Pemerintah Desa yang

---

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala Desa Bab 1 Pasal 1

<sup>82</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab 1 pasal 1 no.3



mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah desa<sup>83</sup>. Pekon Wonoharjo dipimpin oleh Bapak Satri Harso, Pekon Simpang Kanan oleh Bapak Sunaryo S.pd, Pekon Margoyoso oleh Bapak Sudibyo, Pekon Argopeni oleh bapak Kusno dan Pekon Sumbermulyo oleh Bapak Sugito.

Pemerintahan pekon adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>84</sup>. Pemerintahan pekon dalam kerjanya dibantu oleh perangkat pekon yang terdiri dari sekertaris pekon, bendahara pekon KASI Pemerintahan, KASI Umum, KASI Keuangan dan KASI Pembangunan.

Dalam kerjanya pemerintahan pekon masing-masing kepala pekon dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dalam pelayanan terhadap masyarakatnya. Pemerintahan yang baik dalam pandangan islam adalah pemerintahan yang amanah dalam menjalankan kebijakan pemimpin yang amanah yaitu :

- 10) Kecakapan merespon kebutuhan/aspirasi masyarakat
- 11) Bertuturkata yang baik dan menyejukkan
- 12) Memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan masalah
- 13) Jujur (satunya kata dan perbuatan)
- 14) Mencintai dan berpegang kepada kebenaran

---

<sup>83</sup> *Ibid*, Bab 1 pasal 1 nomor 6

<sup>84</sup> *Ibid* no.3

- 15) Bertindak adil dan memulikan masyarakat
- 16) Teguh dan konsisten terhadap cita-cita (visioner)
- 17) Tidak berbuat dzalim kepada rakyatnya
- 18) Berorientasi terhadap pemecahan masalah

Realisasi pemerintahan pekon yang baik terlihat dari prioritas, program kegiatan yang dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat pekon yang meliputi<sup>85</sup> :

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan pekon
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia
- d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
- f. Pendayagunaan sumberdaya alam
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya pekon
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat pekon berdasarkan kebutuhan masyarakat pekon dan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan pekon.

---

<sup>85</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang penyusunan RPJM dan RKPP

Pemerintah pekon dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kepala dusun, ketua RT dan RW.

## 2. Pengelolaan keuangan Pekon

Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

## 3. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan dana melalui rekening desa yang diperoleh dari pendapatan asli desa, dana transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan transfer diperoleh dari Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan keuangan APBD Kabupaten/kota

Berdasarkan data yang dihimpun, perolehan Pendapatan Pekon dari Lima Pekon yaitu :

## a. Pekon Wonoharjo

Dana desa	Rp.590.308.174
Alokasi Dana Desa	Rp. 68.876.939
Bagi Hasil Pajak	Rp. <u>4.604.755</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.663.789.868

## b. Pekon Simpang Kanan

Dana desa	Rp.608.338.411
Alokasi Dana Desa	Rp. 71.611.655
Bagi Hasil Pajak	Rp. <u>4.787.585</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.684.737.661

## c. Pekon Margoyoso

Dana desa	Rp.616.792.755
Alokasi Dana Desa	Rp. 72.893.972
Bagi Hasil Pajak	Rp. <u>4.873.313</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.694.560.040

## d. Pekon Argopeni

Dana desa	Rp.606.286.725
Alokasi Dana Desa	Rp. 71.300.476
Bagi Hasil Pajak	Rp. <u>4.766.781</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.682.353.982

## e. Pekon Sumbermulyo

Dana desa	Rp.569.933.906
Alokasi Dana Desa	Rp. 69.881.893
Bagi Hasil Pajak	Rp. <u>4.671.941</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.671.487.740

## B. Pembangunan Pekon

Pemerintah pekon menyusun perencanaan pembangunan pekon sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan

pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan Pekon dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dengan melibatkan seluruh masyarakat pekon dengan semangat gotong royong. Masyarakat pekon berhak melakukan pemantauan terhadap pembangunan pekon.

Pembangunan Pekon mencakup 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan pekon, Pelaksanaan pembangunan pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon. sesuai dengan data yang telah dihimpun akan dijelaskan realisasi masing-masing bidang dari lima pekon.

#### 1. Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon

Bidang ini mencakup pada penetapan dan penegasan batas pekon, pendataan pekon, penyusunan tata ruang pekon, penyelenggaraan musyawarah pekon, pengelolaan informasi pekon, penyelenggaraan perencanaan pekon, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan pekon, penyelenggaraan kerjasama antar pekon, pembangunan sarana dan prasarana kantor pekon dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi pekon dalam hal ini relaisasi dari lima pekon pada bidang penyelenggaraan pemerintah pekon mengahbiskan dana masing-masing yaitu pekon wonoharjo sebesar Rp.199.136.960, simpang kanan Rp.205.421.298, Margoyoso Rp.205.980.932, Argopeni Rp.204.706.982, Sumbermulyo Rp.206.191.389.

Dari perolehan data tersebut dapat kita lihat bahwa sumbermulyo menghabiskan dana paing banyak dalam merelaisasikan bidang tersebut dibanding dengan empat desa lainnya.

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan pekon

Bidang ini mencakup pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan pekon, saran dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana dan prasaran ekonomi serta pembangan ekonomi produktif, dan pelestarian lingkungan hidup.

Pada realisasiny masing-masing pekon telah melaksanakan pembangunan yang terbasuk dalam bidang ini, seperti pembangunan TPT (thalut penahan tanah) dalam rangka mencegah erosi, pembangunan sarana pendidikan seperti gedung PAUD, pembangunan sarana kesehatan dengan membangun gedung posyandu pembangunan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dari lima pekon yang diteliti menghabiskan dana sebesar Wonoharjo Rp.410.047.000, Simpangan Rp.428.753.600, Margoyoso Rp.395.296.820, Argopeni Rp.432.854.400 dan Sumbermulyo Rp.413.419.200.

Pekon Argopeni paling banyak mengeluarkan dana untuk realisasi bidang pelaksanaan pembangunan.

## 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan bidang ini mencakup Pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketertipan dan ketentraman, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana



dan prasarana olah raga pembinaan lembaga adat, kesenian dan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lain sesuai dengan kondisi pekon.

Realisasi pada bidang ini mengabiskan dana masing-masing pekon sebesar pekon wonoharjo Rp.4.604.755, simpang kanan Rp.22.775.177, Margoyoso Rp.70.815.000, Argopeni Rp.29.791.387 dan Sumbermulyo Rp.35.961.151.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang ini mencakup pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala pekon dan BPD, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Pada realisasinya menghabiskan dana sebesar Wonoharjo Rp.4.500.000 simpang kanan Rp.24.787.585 , margoyoso Rp.22.467.288, Argopeni Rp.15.002.000 dan Sumbermulyo Rp.15.916.000.

#### C. Efektivitas Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Ekonomi

##### 1. Alokasi Dana Desa di Kec. Sumberejo

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (PP No. 72 Th. 2005 pasal 1 ayat 1). ADD bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen ADD dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10% dari pajak

dan retribusi. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa ini adalah untuk<sup>86</sup>:

- e. Meningkatkan penyelenggara pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- f. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- h. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa

Pengembangan pembangunan daerah dengan program Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari kebijakan pembangunan sektoral, pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Dengan pengelolaan dana serta kebijakan pelaksanaan program diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa masing-masing. Pengelola Alokasi dana Desa (ADD) adalah dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari kepala desa sebagai penanggung jawab oprasional, sekertaris desa sebagai penanggung jawab administrasi kegiatan dan urusan keuangan diserahkan pada kepala urusan keuangan atau bendahara desa.

## 2. Pendapatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sumberejo

---

<sup>86</sup> *Ibid.*,

- a. Pekon Wonoharjo dengan luas wilayah 199 ha/m<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 1.763 jiwa mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.68.876.939
- b. Pekon Simpang Kanan dengan luas wilayah 472,25 ha/m<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 2.601 jiwa mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.71.130.705
- c. Pekon Margoyoso dengan luas wilayah 501 ha/m<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 4.142 jiwa mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.72.893.972
- d. Pekon Argopeni dengan luas wilayah 206,5 ha/m<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 2.427 jiwa mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.71.300.476
- e. Pekon Sumbermulyo dengan luas wilayah 229,5 ha/m<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 1.494 jiwa mendapatkan Alokasi Dana Desa Sebesar Rp.69.881.893

Dari data perolehan Alokasi Dana Desa dari masing-masing pekon, dapat diketahui bahwa pekon margoyoso mendapatkan dana paling besar dikarenakan jumlah penduduk yang paling besar.

#### 4. Realisasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sumberejo

Dari tujuan Alokasi Dana Desa dapat kita ketahui bahwa seharusnya realisasi dana tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga perlu diperhatikan.

Dari lima desa yang telah diteliti seluruhnya telah melaksanakan realisasi APB-Pekon secara lengkap. Namun pada bidang pemberdayaan masyarakat hanya dua desa yang memiliki program pemberdayaan berbasis ekonomi yaitu desa wonoharjo, dan desa simpang kanan dimana desa wonoharjo memiliki Usaha Kecil Menengah yang bergerak dalam pengolahan ubi kayu untuk dijadikan makanan ringan yaitu kelanting. Pihak desa memberikan dana yang digunakan untuk membeli alat penggilingan kelanting sebanyak tiga unit dengan besaran dana Rp.4.500.000.

Yang selanjutnya yaitu desa simpang kanan dengan program kelompok wanita tani, program ini bergerak dalam bidang pertanian. Tujuannya agar para anggota kelompok dapat meningkatkan dan memanfaatkan potensi pertanian dalam program ini pihak desa memberikan dana sebesar Rp.2.484.600.

Dapat kita ketahui bahwa, program pemberdayaan ekonomi belum berjalan secara efektif, pembangunan masih sangat terfokus pada program-program non ekonomis. Padahal seharusnya keduanya harus diseimbangkan sehingga dapat terpenuhi tujuan Alokasi Dana Desa.

#### D. Efektivitas Program Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara dalam pandangan Ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa

peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhiratnya. Realisasi Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Ekonomi menjadi salah satu program Pembangunan manusia secara utuh dengan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap dan mentalnya . Pembangunan juga tidak sekedar jasmaninya, tetapi juga rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa serta umat manusia.

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat dengan demikian umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Sehingga Alokasi Dana Desa sebaiknya digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik, agar dapat dialokasikan pada pemberdayaan ekonomi. sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan umat.

Dari data yang dihimpun, perolehan Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Pekon di Kecamatan sumberejo beragam jumlahnya, dengan kisaran 60-70 juta. Tujuan Alokasi Dana Pekon yaitu seperti yang terdapat pada UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 78, tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah :

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- f) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- g) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa

#### 1. Indikator Pemberdayaan Ekonomi dalam perspektif ekonomi islam

- a. *Keadilan*, keadilan yang dimaksud yaitu menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, dan keberanian serta konsistensi dalam hal ini dapat kita lihat dari kebenaran dalam proses realisasi alokasi dana desa, seperti pada nilai kebenaran proposal pengajuan dana



pemberdayaan ekonomi oleh kelompok pelaksana pemberdayaan ekonomi kelompok produksi kelanting dan kelompok wanita tani.

kelompok produksi kelanthing mengajukan proposal untuk pembelian mesin giling dengan nilai Rp. 4.500.000 sebanyak 3 unit. sedangkan kelompok wanita tani mengajukan proposal dengan nilai Rp. 2.484.000.

- b. *Pertanggungjawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khilafah. setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.

Dalam hal ini kelompok pemberdayaan ekonomi memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum tidak hanya kesejahteraan pribadi. berperilaku baik dalam bekerja bersama kelompok dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemberdayaan ekonomi dan kemajuan kelompok. untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pemberdayaan ekonomi ini kelompok produksi kelanting memiliki cara tersendiri yaitu dengan dilakukan diskusi anggota kelompok setiap seminggu sekali untuk fokus mengetahui kondisi masing-masing individu.

pada kelompok wanita tani diberlakukan piket lahan, kepada yang bertugas bertanggung jawab terhadap tanaman pada lahan khusus yang berisikan tanaman-tanaman. piket lahan dilakukan secara bergantian setiap hari agar semua anggota dapat menumbuhkan

rasa memiliki terhadap lahan tersebut sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab untuk menjaga dan merawat tanaman-tanaman.

- c. Tafakul (jaminan Sosial) kelompok pemberdayaan ekonomi bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan menggali potensi untuk dikembangkan sehingga mampu berproduksi. dalam hal ini anggota kelompok memiliki jaminan sosial untuk hidup layak dan berkecukupan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang ditujukan kepada masing-masing Desa untuk dikelola oleh Desa dan untuk Desa dengan melihat kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, desa dapat memanfaatkan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik maupun Non fisik.

1. Di kecamatan Sumberejo terdapat tiga belas desa, yang masing-masing mendapatkan Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang berbeda-beda. Dari lima desa yang diteliti hanya dua desa yang sudah melaksanakan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan Alokasi Dana Desa, dari sini dapat kita ketahui bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa belum efektif pada bidang pemberdayaan ekonomi, hal ini terjadi karena desa yang lain masih banyak diprioritaskan pada pembangunan fisik sehingga masyarakat lebih banyak menganggarkan untuk infrastruktur.
  2. Pemberdayaan Ekonomi Islam melalui Alokasi Dana Desa dengan membentuk kelompok produksi kelanting dan kelompok wanita tani sudah termasuk pada indikator program prioritas yaitu pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- secara umum kelompok produksi kelanting dan kelompok wanita tani dapat dikatakan efektif dalam perspektif ekonomi islam dilihat dari

pencapaian konsep pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam yaitu keadilan, pertanggungjawaban dan takaful.

## **B. Saran**

1. Penyaluran Alokasi Dana Desa pada pembangunan fisik, sebaiknya benar-benar diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan desa sehingga anggaran yang dikeluarkan dapat seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik.
2. Untuk tim pelaksana atau penyalur Alokasi Dana Desa agar dapat lebih memperhatikan potensi masyarakat dalam bidang pemberdayaan ekonomi sehingga pembangunan tidak hanya diprioritaskan pada pembangunan fisik saja.
3. Mengadakan pelatihan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat menggali dan meningkatkan kemajuan pola pikir masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persad.2013
- Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Tanggamus, *Materi Bimbingan Teknis Kepala Pekon Se-Kabupaten Tanggamus*. Tanggamus: Pemda Tanggamus, 2015
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung: Fokus Media, 2010
- Departemen Agama RI Al-Qur'qn dan Terjemah, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Didiek Setia Budi Hargono, *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Empat Desa di Kabupaten Karang AsemProvinsi Bali* : Tesis Program magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, Jakarta 2010.
- Dody Rudianto, *Pembangunan Ekonomi dan perkembangan Bisnis di Indonesia* Jakarta: Golden Terayon 1985, dalam Agung Eko Purwana, *Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, :Justitia Islamica, vol. 10/No. 1Jan-juni 2013
- Edi Suharto, *Memangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung :PT. Refika Aditama, 2014.
- Hadi Soesastro, dkk., *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*,Yogyakarta : Penerbit Kansius, 2005.
- Hasan, M. Iqbal .*Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.Jakarta: Ghalia Indonesia,2000.
- IGusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan* ,Yogyakarta : CV Andi Offset,2002

- Jhingan M.L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Cetakan ke-15, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998
- M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2000.
- Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, terj. Achmad Rais Jakarta: Gema Insani Press, 1991 dalam Agung Eko Purnama, *Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi islam*, Justitia Islamica, Vol. 10/No.1/jan-juni 2013.
- Masaed, Muchtar, *Jurnal Media Inovasi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 1997
- Nanich Mahendrawati, Agus Ahmad Safi, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. *Buku Saku Sosialisasi Perundang-undangan*. Bagian Hukum Sekertariat Daerah : Kabupaten Tanggamus. 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014: Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Prijono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Rajawali Pers Depok. 2008
- Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*. Jakarta: CV Taberi, 1995
- Sadu Wasistiono, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung : FokusMedia, 2010.
- Soeratno, Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta. 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta. 2006

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



